



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini kami susun sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyediaan perumahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029 maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Mekanisme penyusunan dokumen Rencana Strategis berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman IV Tahun 2025 - 2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV untuk periode lima tahun mendatang. Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV.

**KEPALA
BALAI P3KP
SUMATERA IV**

IR. M. ARIFMAN S.T, M.T.



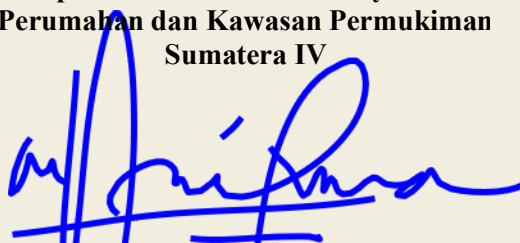


KATA PENGANTAR

Substansi Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025 – 2029. Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perumahan yang bersifat multisektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Jambi, Desember 2025
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera IV



Ir. Arifman, S.T., M.M., M.T.
NIP 19750922 200212 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
1. 1 Kondisi Umum	3
1.1.1 Landasan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	3
1.1.2. Kedudukan dan Peran BP3KP Sumatera IV	4
1.1.3 Karakteristik Wilayah Kerja Sumatera IV	6
1.1.4 Capaian Kinerja BP2P Sumatera IV Periode 2020–2024.....	8
1.1.5 Kondisi <i>Backlog</i> Perumahan di Wilayah Sumatera IV	11
1.2 Potensi dan Permasalahan	12
1.2.1 Potensi Internal dan External Wilayah Sumatera IV	12
1.2.2 Permasalahan Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman	14
1.2.3 Matriks Analisis <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i> (SWOT) BP3KP Sumatera IV	15
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	18
2.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman (BP3KP) Sumatera IV	18
2.2. Sasaran Program.....	19
2.2.1 Sasaran Program BP3KP Sumatera IV	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	26
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi	26
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen. KP).....	26
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	27
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	29
3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen. TKPR)	30
3.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal	32



DAFTAR ISI

3.1.6 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal	34
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV	34
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	36
3.3.1 Fungsi dan Struktur Organisasi BP3KP Sumatera IV	36
3.3.2 Tata Laksana Internal dan Eksternal.....	39
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	43
4.1 Target Kinerja.....	43
4.2 Kerangka Pendanaan	49
BAB V PENUTUP.....	56
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.4. 1 Sasaran dan Indikator Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	9
Tabel 1.1.4. 2 Target Program Teknis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Periode Tahun 2020-2024.....	10
Tabel 1.1.5. 1 Data Backlog Kota Bengkulu.....	11
Tabel 1.1.5. 2 Data Backlog Kota Jambi.....	11
Tabel 1.2.3. 1 Matriks Analisis SWOT BP3KP Sumatera IV	16
Tabel 4.1. 1 Matriks Target Kinerja BP3KP Sumatera IV	44
Tabel 4.2. 1 Kerangka Pendanaan	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.2. 1 Peta Provinsi Jambi	5
Gambar 1.1.2. 2 Peta Provinsi Bengkulu	6
Gambar 2.2. 1 Pohon Kinerja BP3KP Sumatera IV	21
Gambar 3.3.1. 1 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera IV	38
Gambar 3.3.2. 1 Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT	40





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

Kementerian merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Kementerian ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas yang diemban, Kementerian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian; Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Bab ini menguraikan kondisi umum serta potensi dan permasalahan yang menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV Tahun 2025–2029. Uraian pada bab ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi, peran, dan tantangan BP3KP Sumatera IV dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerjanya.



Penyusunan bab ini berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Unit Organisasi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan dinamika strategis, karakteristik kewilayahan, dan kondisi aktual perumahan dan permukiman pada wilayah Sumatera IV.

1. 1 Kondisi Umum

1.1.1 Landasan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak dasar setiap warga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Amanat tersebut secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam konteks pembangunan nasional, sektor perumahan dan kawasan permukiman berperan sebagai fondasi pembentukan masyarakat yang produktif, inklusif, dan berdaya saing. Penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan ketimpangan wilayah, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan. Sejalan dengan visi RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah serta pembangunan manusia unggul. Arah kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMN 2025–2029, yang menargetkan peningkatan proporsi rumah tangga berhunian layak dan penurunan luasan kawasan kumuh secara berkelanjutan melalui pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis wilayah.

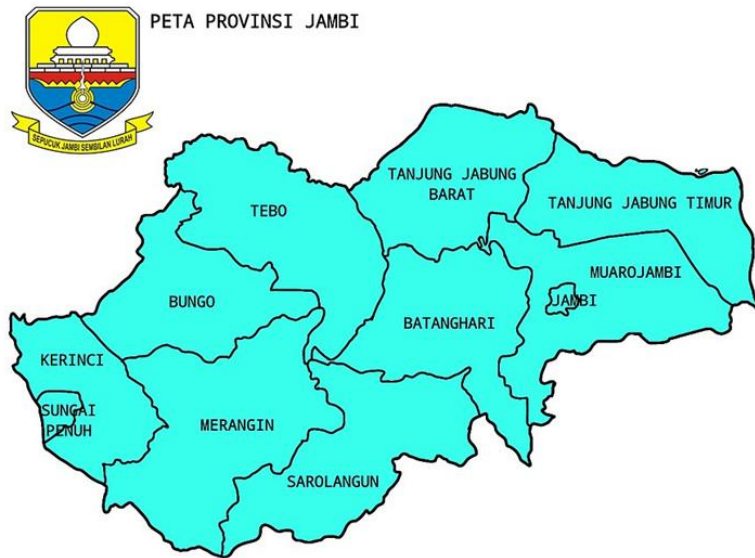
1.1.2. Kedudukan dan Peran BP3KP Sumatera IV

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pusat di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat regional. Pembentukan BP3KP Sumatera IV didasarkan pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Secara struktural, BP3KP Sumatera IV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam kedudukan tersebut, BP3KP Sumatera IV memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset hasil pembangunan.

Melalui peran tersebut, BP3KP Sumatera IV diharapkan mampu menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan dan kondisi riil di daerah, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Wilayah kerja BP3KP Sumatera IV meliputi:



Gambar 1.1.2. 1 Peta Provinsi Jambi

1. **Provinsi Jambi**, yang terdiri 11 Kabupaten/Kota yaitu:

- Kota Jambi
- Kota Sungai Penuh
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Kabupaten Muaro Jambi
- Kabupaten Batanghari
- Kabupaten Tebo
- Kabupaten Muaro Bungo
- Kabupaten Sarolangun
- Kabupaten Merangin
- Kabupaten Kerinci





Gambar 1.1.2. 2 Peta Provinsi Bengkulu

2. **Provinsi Bengkulu**, yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yaitu:

- Kota Bengkulu
- Kabupaten Mukomuko
- Kabupaten Bengkulu Utara
- Kabupaten Kepahiang
- Kabupaten Rejang Lebong
- Kabupaten Bengkulu Tengah
- Kabupaten Lebong
- Kabupaten Seluma
- Kabupaten Bengkulu Selatan
- Kabupaten Kaur

1.1.3 Karakteristik Wilayah Kerja Sumatera IV

Wilayah kerja BP3KP Sumatera IV yang meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu memiliki karakteristik topografis sosial, dan ekonomi yang beragam dan berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Keberagaman karakteristik

wilayah tersebut berdampak pada perbedaan kebutuhan hunian, tingkat backlog perumahan, serta pendekatan pelaksanaan program yang diterapkan di masing-masing wilayah.

Secara topografis, wilayah Sumatera IV mencakup kawasan pesisir, dataran rendah, serta wilayah perbukitan dan pegunungan yang merupakan bagian dari bentang alam Bukit Barisan. Pada Provinsi Jambi, wilayah dataran rendah dan dataran aluvial berkembang di sepanjang daerah aliran Sungai Batanghari sebagai pusat aktivitas permukiman dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pada Provinsi Bengkulu, sebagian wilayah berada pada kawasan perbukitan dan pesisir barat Sumatera dengan kondisi topografi yang relatif curam. Kondisi topografis tersebut berimplikasi pada keterbatasan ketersediaan lahan siap bangun, kebutuhan penyesuaian desain bangunan, serta perlunya pendekatan pembangunan perumahan yang memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

Dari sisi tipologi permukiman, wilayah kerja BP3KP Sumatera IV didominasi oleh permukiman perdesaan dan semi-perkotaan dengan sebaran yang relatif luas dan kepadatan rendah hingga sedang. Permukiman perkotaan berkembang pada pusat-pusat kegiatan wilayah dan ibu kota kabupaten/kota, sedangkan permukiman perdesaan tersebar di wilayah pedalaman yang bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lokal lainnya. Pola sebaran permukiman tersebut menuntut pendekatan pembangunan perumahan yang bersifat desentralistik, berbasis komunitas, dan disesuaikan dengan kapasitas sosial ekonomi masyarakat setempat.

Dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, wilayah kerja BP3KP Sumatera IV menghadapi sejumlah isu kewilayahan yang bersifat lintas daerah, antara lain keterbatasan aksesibilitas menuju lokasi permukiman tertentu, ketimpangan tingkat pelayanan infrastruktur dasar antarwilayah, serta masih ditemukannya permukiman yang berkembang tidak terencana.



Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas hunian dan lingkungan permukiman pada sebagian wilayah, sehingga memerlukan intervensi pemerintah yang terarah, terintegrasi, dan berbasis kondisi wilayah.

Perubahan BP2P (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan) yang merupakan UPT dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berfokus pada implementasi program penyediaan rumah, termasuk pembangunan rumah baru, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta dukungan teknis kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian terjadi restrukturisasi menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada akhir tahun 2024 BP3KP (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang fokusnya diperluas tidak hanya mencakup penyediaan perumahan, tetapi juga penanganan dan pengembangan kawasan permukiman.

1.1.4 Capaian Kinerja BP2P Sumatera IV Periode 2020–2024

Pada periode 2020–2024, BP2P Sumatera IV telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah.

Ringkasan capaian kinerja BP2P Sumatera IV periode 2020–2024:

- a. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
- b. Pembangunan Rumah Susun
- c. Pembangunan Rumah Khusus
- d. Fasilitasi bantuan PSU:
- e. Kegiatan pendukung manajemen dan tata kelola

Tabel 1.1.4. 1 Sasaran dan Indikator Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

SASARAN		INDIKATOR
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau di Provinsi Bengkulu	
Sasaran Program	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman layak huni di Provinsi Bengkulu	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusun Perencanaan Penyediaan Perumahan 2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun 4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun 6. Jumlah Rumah Umum yang mendapat fasilitasi Layanan Bantuan PSU
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusun Perencanaan Penyediaan Perumahan 2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun 4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun 6. Jumlah Rumah Umum yang mendapat fasilitasi Layanan Bantuan PSU

Sumber: Renstra BP2P Sumatera IV tahun 2020 - 2024

Tabel 1.1.4. 2 Target Program Teknis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Periode Tahun 2020-2024

Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024			Total	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan penyediaan Perumahan	Laporan	6	6	100%	5	5	100%	6	6	100%	5	5	100%	4	4	100%	22	26
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	7700	7700	100%	9255	4211	45,65%	3876	3873	99,92%	4284	4284	100%	1708	1701	99,59%	25115	21769
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	unit			-	190	196	103,15%	13	13	100%	120	120	100%	119	119	100%	323	448
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	4	4	100%	3	3	100%	6	5	83,33%	4	4	100%	1	1	100%	17	17
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit			-	30	30	100%	2	2	100%			-			-	32	32
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit			-			-			-	25	25	100%			-	25	25
Jumlah Rumah Umum yang mendapat Fasilitas layanan bantuan PSU	Unit			-	150	150	100%	630	638	101,2%	915	1158	126,5%	462	462	100%	1695	2408
Jumlah Laporan Pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan			-			-			-	2	2	100%	3	3	100%	2	5
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	1	33,33%	1	1	100%	10	9
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	11	14
Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	11	14

Sumber: Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV

1.1.5 Kondisi *Backlog* Perumahan di Wilayah Sumatera IV

Kondisi backlog perumahan di wilayah kerja BP3KP Sumatera IV masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan perumahan. Backlog mencakup backlog kepemilikan maupun backlog kelayakan (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Untuk backlog kepemilikan rumah, Provinsi Jambi tercatat sebanyak 130.224 unit, sementara Provinsi Bengkulu sebesar 71.945 unit. Backlog kelayakan atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Jambi terdapat 217.888 unit rumah yang masuk kategori tidak layak huni, sedangkan di Provinsi Bengkulu mencapai 228.073 unit.

Tabel 1.1.5. 1 Data *Backlog* Kota Bengkulu

No	Kabupaten/Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Kualitas	Total <i>Backlog</i> Perumahan
1	Kabupaten Rejang Lebong	11.552	41.058	52.610
2	Kabupaten Bengkulu Utara	8.726	39.404	48.130
3	Kabupaten Seluma	5.370	30.064	35.434
4	Kabupaten Muko-Muko	6.197	23.601	29.798
5	Kota Bengkulu	18.470	8.424	26.894
6	Kabupaten Bengkulu Selatan	7.043	19.663	26.706
7	Kabupaten Kepahiang	4.176	19.201	23.377
8	Kabupaten Kaur	3.236	16.177	19.413
9	Kabupaten Bengkulu Tengah	3.085	16.099	19.184
10	Kabupaten Lebong	4.090	14.382	18.47
Total		71.945	228.073	300.018

Sumber : *Dashboard* Perumahan dan Kawasan Permukiman (my.pkp.go.id)

Tabel 1.1.5. 2 Data *Backlog* Kota Jambi

No	Kabupaten/Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Kualitas	Total <i>Backlog</i> Perumahan
1	Merangin	9.375	37.819	47.194
2	Tebo	9.307	36.898	46.205
3	Jambi	31.243	7.056	38.299

4	Kerinci	12.930	19.219	32.149
5	Muaro Jambi	13.681	18.108	31.789
6	Bungo	14.114	17.559	31.673
7	Sarolangun	9.217	22.039	31.256
8	Tanjung Jabung Barat	9.432	20.019	29.451
9	Batanghari	10.219	18.006	28.225
10	Tanjung Jabung Timur	5.599	18.081	23.680
11	Sungai Penuh	5.107	3.084	8.191
Total		130.224	217.888	348.112

Sumber: *Dasboard* Perumahan dan Kawasan Permukiman (*my.pkp.go.id*)

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi Internal dan External Wilayah Sumatera IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025, BP3KP bertransformasi menjadi simpul utama implementasi kebijakan yang tidak lagi terkotak – kotak oleh delineasi kawasan, melainkan berbasis pada pendekatan pengembangan wilayah yang terpadu. BP3KP Sumatera IV memiliki sejumlah potensi internal yang dapat menjadi modal strategis dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain:

- a. Kapasitas kelembagaan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kebijakan pusat secara langsung di wilayah.

Sebagai UPT Kementerian, BP3KP Sumatera IV memiliki legitimasi struktural dan kewenangan operasional untuk menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam pelaksanaan program di wilayah. Posisi ini memberikan beberapa keunggulan strategis:

- 1) Akses langsung terhadap kebijakan, regulasi, dan program prioritas nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- 2) Kemampuan melakukan koordinasi vertikal dengan Direktorat Jenderal terkait secara lebih cepat dan terstruktur.

- 3) Peran sebagai simpul koordinasi teknis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan.
- b. Ketersediaan sumber daya manusia teknis dan administratif sesuai struktur organisasi balai.
Struktur organisasi balai didukung oleh tenaga teknis konstruksi, perencanaan, pengawasan, serta tenaga administrasi dan pengelola anggaran. Keberadaan SDM yang sesuai formasi memungkinkan:
 - 1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan/perbaikan rumah sesuai standar teknis dan regulasi.
 - 2) Pengendalian mutu dan pengawasan konstruksi yang lebih akuntabel.
 - 3) Pengelolaan administrasi dan keuangan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Pengalaman pelaksanaan program perumahan pada periode sebelumnya.
Pengalaman implementasi berbagai program perumahan, termasuk rumah swadaya dan program bantuan pemerintah, memberikan pembelajaran kelembagaan (institutional learning) yang penting. Pengalaman ini mencakup:
 - 1) Pemahaman karakteristik sosial-ekonomi masyarakat penerima manfaat.
 - 2) Pengelolaan risiko pelaksanaan di lapangan, termasuk kendala teknis dan administratif.
 - 3) Model koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal.

Selain potensi internal, BP3KP Sumatera IV juga didukung oleh potensi eksternal wilayah, antara lain:

- a. Dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu menunjukkan dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program Nasional Tiga Juta Rumah melalui berbagai langkah

- kebijakan dan koordinasi yang bersinergi dengan BP3KP Sumatera IV sebagai unit pelaksana teknis di wilayah. Dukungan tersebut diwujudkan antara lain melalui komitmen kepala daerah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, serta keterlibatan aktif dalam forum koordinasi dengan pemerintah pusat.
- b. Potensi sinergi pendanaan dengan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, CSR, dan pemangku kepentingan lainnya. BP3KP Sumatera IV memiliki peran strategis dalam memfasilitasi sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha agar pelaksanaan CSR pembangunan rumah dapat terintegrasi dengan perencanaan dan program perumahan dan kawasan permukiman.
 - c. Kearifan lokal dan budaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.

1.2.2 Permasalahan Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman

Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan perencanaan yang komprehensif, termasuk kurangnya perhatian dalam penyusunan dokumen RP3KP sebagai pedoman strategis pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, menjadi tantangan mendasar dalam penyelenggaraan PKP di daerah. Kondisi tersebut berdampak pada belum terarah dan terintegrasinya kebijakan pembangunan perumahan, sementara di sisi lain kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Permasalahan ini semakin kompleks karena belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan mutakhir, sehingga perumusan kebijakan dan penentuan prioritas program belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap desain serta keandalan bangunan belum optimal, yang memengaruhi kualitas dan ketahanan hunian, serta kurang

terintegrasinya upaya penanganan kawasan kumuh perkotaan yang masih bersifat sektoral. Seluruh kondisi tersebut diperkuat oleh regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sepenuhnya sinergis antara pusat dan daerah, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan hambatan dalam pelaksanaan program secara efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, BP3KP Sumatera IV menghadapi berbagai permasalahan strategis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain:

- a. Tingginya *backlog* perumahan dan keterbatasan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- b. Keterbatasan lahan yang sesuai peruntukan dan memiliki legalitas.
- c. Kualitas rumah dan kawasan permukiman yang belum sepenuhnya memenuhi standar layak huni, khususnya pada aspek sanitasi, air minum, dan ketahanan bangunan.
- d. Keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada dana APBN.

Selain permasalahan teknis, BP3KP Sumatera IV juga menghadapi tantangan kelembagaan dan tata kelola, antara lain:

- a. Kesenjangan kapasitas dan distribusi SDM teknis di lapangan.
- b. Implementasi NSPK yang belum optimal di tingkat daerah.
- c. Keterbatasan sistem data dan informasi perumahan yang terintegrasi dan mutakhir.

1.2.3 Matriks Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) BP3KP Sumatera IV

Sebagai tindak lanjut dari analisis kondisi umum wilayah kerja, di susunlah analisis SWOT untuk memetakan posisi BP3KP Sumatera IV saat ini. Analisis ini mengelompokkan berbagai faktor penentu keberhasilan ke dalam aspek internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta aspek eksternal (Peluang dan Tantangan). Pemetaan ini berfungsi sebagai navigasi utama



dalam penyusunan arah kebijakan Balai ke depan. Berikut adalah rincian Matriks SWOT BP3KP Sumatera IV.

Tabel 1.2.3. 1 Matriks Analisis SWOT BP3KP Sumatera IV

Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesse</i>)
	1. Legitimasi dan kewenangan sebagai UPT Kementerian. 2. Akses langsung terhadap Program 3 Juta Rumah. 3. Koordinasi efektif dengan pemda dan <i>stakeholder</i>. 4. Fasilitasi sinergi pendanaan (APBN, CSR, BUMN/BUM).	1. Perencanaan daerah belum optimal (RPKP). 2. Program belum terintegrasi. 3. Sistem data belum akurat dan terintegrasi. 4. Kesenjangan SDM teknis. 5. Ketergantungan APBN.
Faktor Eksternal	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantang (<i>Threats</i>)
	1. Dukungan pemda. 2. Momentum Program 3 Juta Rumah. 3. Sinergi pembiayaan multipihak. 4. Gotong royong masyarakat. 5. Tingginya kebutuhan hunian.	1. Backlog tinggi. 2. Daya beli MBR rendah. 3. Keterbatasan lahan legal. 4. Kualitas hunian belum standar. 5. Regulasi belum sinergis. 6. Penanganan kumuh masih sektoral.

Sumber: Analisis Tim Penyusun BP3KP Sumatera IV

Secara umum, BP3KP Sumatera IV memiliki kekuatan kelembagaan dan posisi strategis dalam implementasi kebijakan nasional, serta didukung peluang berupa komitmen daerah dan potensi sinergi pendanaan. Namun, tantangan utama terletak pada lemahnya integrasi perencanaan, keterbatasan data dan SDM, backlog perumahan yang tinggi, serta keterbatasan anggaran dan lahan.



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman (BP3KP) Sumatera IV

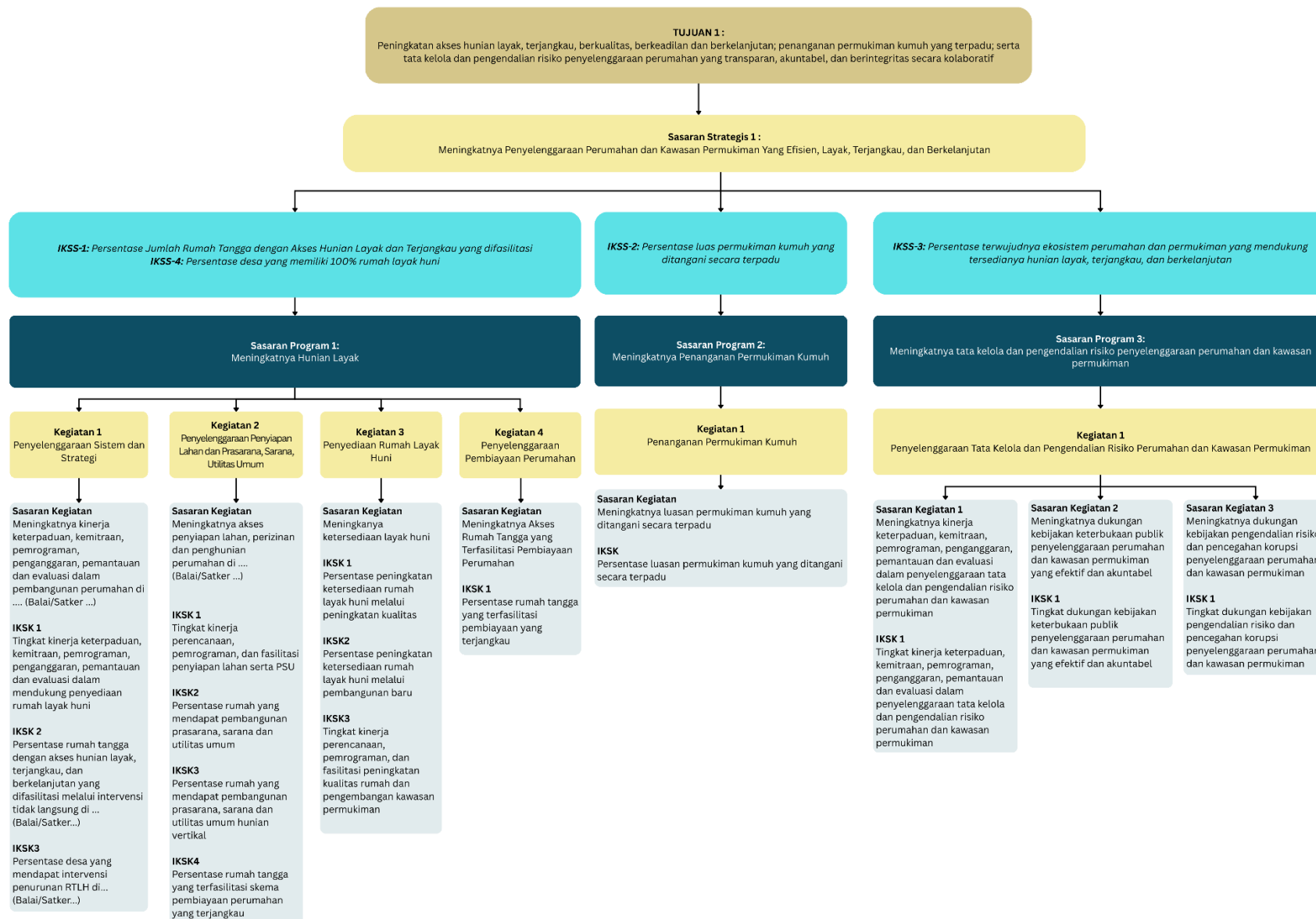
Mengacu pada arah kebijakan nasional dan Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025 – 2029, BP3KP Sumatera IV menetapkan tujuan organisasi sebagai landasan operasional pelaksanaan program di wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Tujuan ini dirancang untuk memastikan terwujudnya hunian layak yang diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dijabarkan menjadi 2 (dua) tujuan sebagai berikut:

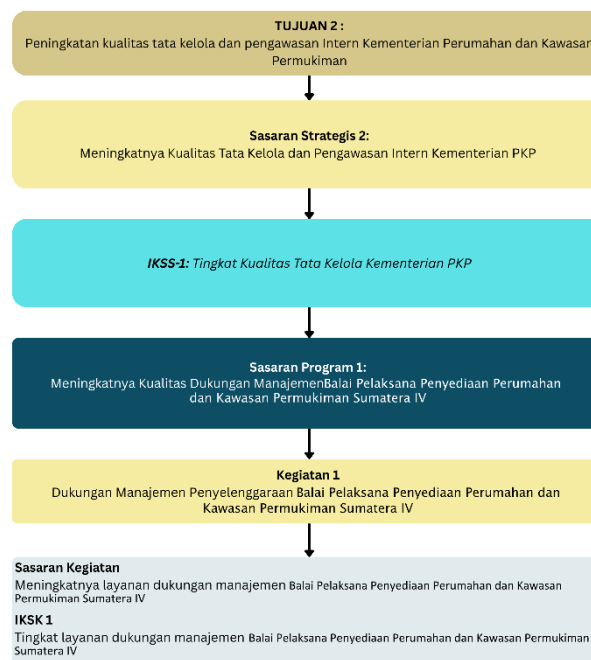
- a. Tujuan pertama yaitu “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - 1) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - 2) persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - 3) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - 4) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - 5) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - 6) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - 7) Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

- 8) Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 - 9) Persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni; dan
 - 10) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
- b. Tujuan kedua yaitu “peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.2. Sasaran Program

Sasaran BP3KP Sumatera IV selaras dengan Sasaran Strategis (SS) Kementerian, di mana BP3KP berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang memastikan 100% implementasi kebijakan di lapangan. Berikut disajikan bagan Sasaran Program dan turunannya pada Sasaran Kegiatan hingga Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh BP3KP Sumatera IV.





Gambar 2.2. 1 Pohon Kinerja BP3KP Sumatera IV

2.2.1 Sasaran Program BP3KP Sumatera IV

Sebagaimana tergambar pada Pohon Kinerja, BP3KP Sumatera IV melaksanakan Sasaran Program dari 5 Unit Organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu: Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; dan Sekretariat Jenderal; hal ini menyebabkan terdapat 5 DIPA pada BP3KP Sumatera IV Secara rinci, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, hingga Indikator Kinerja BP3KP Sumatera IV sebagai berikut:

- a. **SP-1:** Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman)

Sasaran program ini berfokus pada peningkatan kualitas fisik rumah agar memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

IKP 1.1: Persentase ketersediaan rumah layak huni

Mengukur proporsi rumah yang telah memenuhi standar teknis rumah layak huni dibandingkan total rumah yang ada.

IKP 1.2: Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni

Menilai capaian desa yang seluruh unit rumahnya telah memenuhi kriteria kelayakan huni.

- b. **SP-2:** Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman)

Program ini diarahkan untuk mengurangi luas dan tingkat kekumuhan melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

IKP 2.1: Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh

Mengukur peningkatan luasan atau jumlah kawasan kumuh yang berhasil ditangani dibandingkan kondisi awal.

- c. **SP-3:** Meningkatnya Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman)

Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan sistem dan ekosistem perumahan agar penyediaan hunian layak dapat berlangsung secara berkelanjutan.

IKP 3.1: Persentase pembangunan ekosistem perumahan dan permukiman

Mengukur perkembangan sistem pendukung perumahan, termasuk regulasi, pembiayaan, dan kemitraan.

IKP 3.2: Persentase layanan fasilitasi pengadaan konsumen perumahan

Menilai efektivitas fasilitasi pemerintah dalam membantu masyarakat mengakses pembiayaan perumahan.

IKP 3.3: Persentase peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Menggambarkan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perumahan.

d. **SP-4:** Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perdesaan (Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan)

Program ini diarahkan untuk pemerataan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan.

IKP 4.1: Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan

Mengukur ketersediaan hunian layak yang dapat dijangkau masyarakat desa.

IKP 4.2: Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perdesaan

Menilai upaya pengurangan kawasan kumuh di desa.

IKP 4.3: Persentase desa dengan 100% rumah layak huni

Menunjukkan keberhasilan pembangunan perumahan desa secara menyeluruh.

e. **SP-5:** Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan (Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan)

Sasaran ini menanggapi tantangan urbanisasi dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan.

IKP 5.1: Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan

Mengukur keterjangkauan hunian layak bagi masyarakat perkotaan.

IKP 5.2: Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perkotaan

Menilai efektivitas penanganan kawasan kumuh perkotaan.

IKP 5.3: Persentase wilayah perkotaan dengan 100% rumah layak huni

Menggambarkan capaian kualitas hunian secara merata di perkotaan.

- f. **SP-6:** Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ((Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)

Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola, regulasi, dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan perumahan.

IKP 6.1: Persentase penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK

Mengukur tingkat implementasi kebijakan dan standar teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

IKP 6.2: Persentase efisiensi dan efektivitas kelembagaan pembangunan perumahan

Menilai kinerja kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program secara optimal.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen. KP)

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - 2) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - 3) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - 4) Penyediaan Prasarana, Saranan, dan Utilitas (PSU) pada hunian tapak dan vertikal.
- b. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - 2) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas *stakeholder* perumahan dan masyarakat; dan
 - 3) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.

- c. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.
- d. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2) Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
 - 3) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4) Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
 - 5) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
 - 6) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - 3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
 - 4) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - 5) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.

- b. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
 - 1) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - 2) Pengembangan skema tabungan berencana;
 - 3) Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
 - 4) Pengembangan skema Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR);
 - 5) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - 6) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
- c. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
 - 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 - 2) Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - 3) Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 - 4) Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - 5) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - 6) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - 7) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
- d. Meningkatkan kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:

- 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
- 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
- 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 4) Pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- 5) Penguatan kelembagaan.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - 3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - 4) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- b. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
- c. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
- d. Meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:

- 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - 2) Kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan v. Penguatan kelembagaan.
- e. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antar level pemerintahan.
 - f. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
 - g. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
 - h. Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen. TKPR)

- a. Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk

intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.

- b. Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- c. Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema terjangkau di Indonesia (*Indonesia Green Affordable Housing Program* atau IGAHP).
 - 2) Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain.
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan.
 - 4) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
- d. Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri PKP tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

- f. Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:
- 1) *Governance*, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - 2) *Risk*, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 - 3) *Compliance*, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - 4) *Financing*, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (*off-take guarantee*); dan Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

3.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - 1) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - 2) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- b. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - 1) Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - 2) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
- c. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui strategi:
 - 1) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) dan kompetensi;

- 2) Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- d. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
- 1) Sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- e. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
- 1) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - 2) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan ke humasan secara profesional dan responsif.
- f. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
- 1) Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - 2) Digitalisasi dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- g. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
- 1) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - 2) Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- h. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
- 1) Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - 2) Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
- i. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
- 1) Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan

- 2) Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- j. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
 - 1) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan
 - 2) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

3.1.6 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Berbagai strategi percepatan pencapaian target 3 juta rumah dilaksanakan melalui intervensi langsung maupun tidak langsung, yang diwujudkan dalam bentuk inisiatif dan inovasi lintas sektor. Upaya ini mencerminkan semangat kolaboratif dan adaptif dalam menjawab tantangan penyediaan hunian layak, serta menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV sebagai unit pelaksana teknis (operator) memastikan 100% implementasi arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menjamin peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau di wilayah kerja Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Kebijakan ini menempatkan BP3KP Sumatera IV tidak hanya sebagai operator pembangunan fisik APBN, tetapi juga sebagai katalisator yang mengorkestrasi sumber daya dari Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, dan Masyarakat (Filantropi) untuk mengatasi keterbatasan fiskal negara melalui penguatan ekosistem kolaborasi lintas sektor.

Arah kebijakan dan strategi BP3KP Sumatera IV disusun berdasarkan penyelarasan dengan unit organisasi pusat (Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal), keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam sharing burden penanganan backlog, kontribusi sektor swasta dan dunia usaha melalui skema KPBU dan CSR/TJSL, serta partisipasi pihak lain (filantropi dan masyarakat) dalam model Quadruple Helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi, dan Komunitas). Mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

serta unit organisasi terkait, BP3KP Sumatera IV menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk periode Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai. Strategi yang ditempuh meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas layanan tata usaha, khususnya dalam pengelolaan kearsipan yang tertib dan modern, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
- 2) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan ke humasan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
- 3) Klinik PKP sebagai sarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, layanan konsultasi, dan pendampingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

b. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Arah kebijakan ini difokuskan pada perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan secara terpadu di Provinsi Jambi dan Bengkulu. Strategi yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Percepatan pembangunan perumahan melalui penyediaan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
- 2) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya serta penyediaan sarana sanitasi yang layak;
- 3) Fasilitasi penyediaan lahan perumahan yang aman, legal, dan terjangkau; serta
- 4) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada hunian tapak maupun hunian vertikal.
- 5) Penanganan rumah layak huni dan permukiman kumuh.

c. Peningkatan Kualitas Permukiman Secara Terpadu

Arah kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan berdaya saing di wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Strategi yang ditempuh meliputi:

- 1) Pendampingan dan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pemenuhan kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu;
- 2) Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman, meliputi perumahan, jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, serta sistem proteksi kebakaran;
- 3) Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan serta penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- 4) Penguatan sistem pendataan serta monitoring dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) Pembinaan kepada pelaku usaha perumahan serta fasilitasi perlindungan konsumen di bidang perumahan; dan
- 6) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material bangunan guna mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

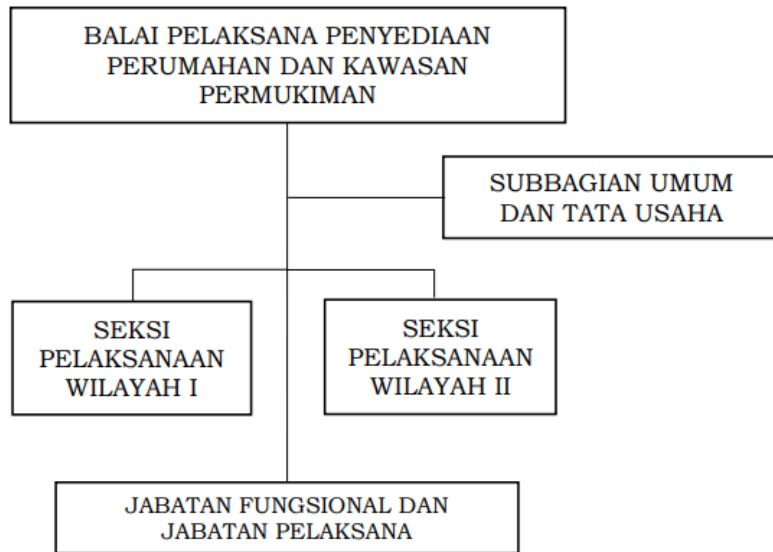
3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan kebutuhan fungsi dan susunan organisasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, termasuk pengaturan tata laksana antar unit organisasi baik di lingkungan internal maupun dengan pihak eksternal, serta pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup aspek kualitas dan kuantitas.

3.3.1 Fungsi dan Struktur Organisasi BP3KP Sumatera IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian PKP, BP3KP sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.



Gambar 3.3.1. 1 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera IV

Struktur BP3KP Sumatera IV sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dirancang dengan efektif guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Susunan organisasi BP3KP Sumatera IV terdiri atas:

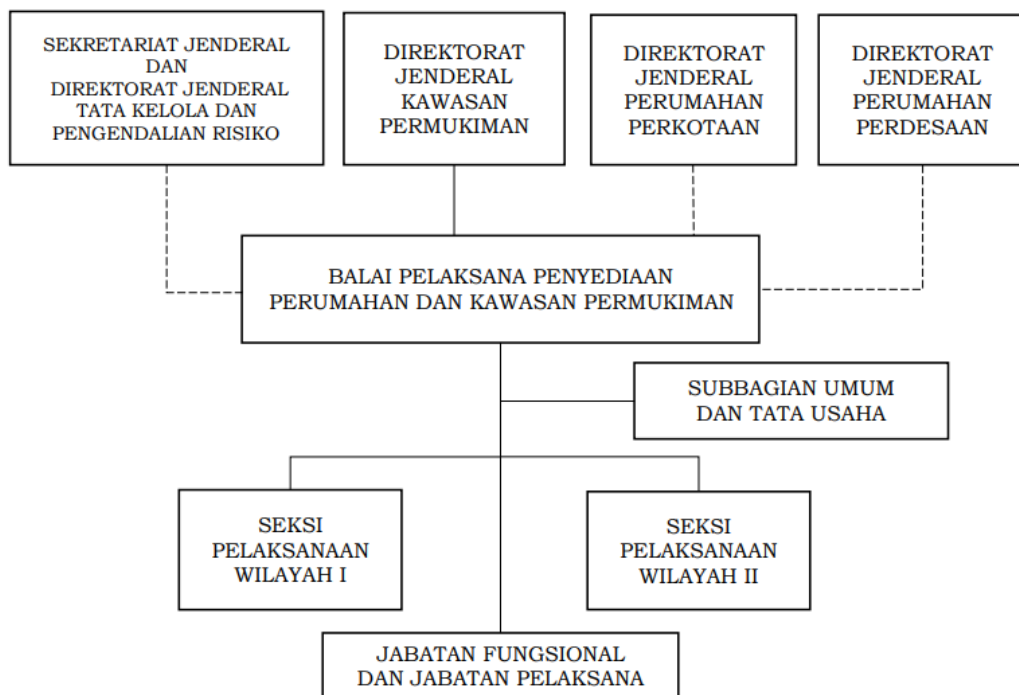
- a. **Kepala Balai**, yang bertindak sebagai penanggung jawab utama atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerja Sumatera IV.
- b. **Subbagian Umum dan Tata Usaha**, yang melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta administrasi sumber daya manusia. Subbagian ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan serta koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan `zona integritas, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, pelaksanaan komunikasi publik, serta penyelenggaraan layanan hukum balai.
- c. **Seksi Pelaksanaan Wilayah I**, yang bertugas melaksanakan penyiapan kegiatan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial. Selain itu, seksi ini melaksanakan koordinasi penyediaan lahan, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum,

fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta verifikasi data.

- d. **Seksi Pelaksanaan Wilayah II**, yang melaksanakan penyiapan kegiatan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta verifikasi data.
- e. **Jabatan Fungsional**, yang terdiri atas jabatan fungsional teknis tertentu, antara lain Penata Kelola Perumahan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Analis Keuangan APBN, serta jabatan fungsional lainnya. Kelompok jabatan ini memberikan pelayanan fungsional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.

3.3.2 Tata Laksana Internal dan Eksternal

BP3KP Sumatera IV memiliki hubungan komando langsung dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman selaku unit pembina teknis. Selain hubungan komando tersebut, BP3KP Sumatera IV juga menjalin hubungan koordinasi dengan unit organisasi lain di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Keterangan:

----- garis koordinasi

———— garis komando

Gambar 3.3.2. 1 Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT

Koordinasi antar unit organisasi meliputi:

1. Sekretariat Jenderal, dalam rangka pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta penyelenggaraan rumah tangga balai.
2. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, untuk mendukung sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program perumahan, mengingat BP3KP Sumatera IV melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan mandat kedua direktorat jenderal tersebut di tingkat lapangan.
3. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dalam rangka pelaksanaan dan penguatan penerapan sistem manajemen risiko, peningkatan kepatuhan internal, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan BP3KP Sumatera IV.

Penyelenggaraan tata laksana eksternal BP3KP Sumatera IV difokuskan pada penguatan kerja sama yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, sektor swasta, kalangan akademisi, serta masyarakat. Upaya tersebut didukung oleh pemanfaatan sistem data terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV periode 2025 – 2029 ditetapkan sebagai wujud komitmen unit kerja dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Penetapan target ini disusun melalui pendekatan perencanaan berbasis kinerja (performance – based planning) yang menjabarkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian PKP ke dalam target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART) di wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Indikator kinerja yang ditetapkan mencakup tingkatan hierarki kinerja (cascading) mulai dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai dampak (impact), Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai hasil (outcome), hingga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Output sebagai keluaran nyata. Target – target ini difokuskan pada penyelesaian isu strategis utama, yaitu pengurangan backlog kepemilikan dan kelayakan hunian, penanganan kawasan kumuh terpadu, serta peningkatan kualitas tata kelola internal Balai. Rincian target kinerja tahunan BP3KP Sumatera IV selama periode 2025 – 2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. 1 Matriks Target Kinerja BP3KP Sumatera IV

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan									
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:									
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi								
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak									
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen		-	1	1	1	1	4
3	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4
4	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4
5	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4
6	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4
7	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan		-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1		-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit		-	669	669	669	669	2.676
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit		-	-	-	-	-	-
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen		-	-	1	1	1	3
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1		-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit		1.098	8.007	8.007	8.007	8.007	33.126
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit			593	593	593	593	2.372
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit		32	88	88	88	88	384
	4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan		-	1	1	1	1	4
	5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4
	7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4
	8	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
-1		-2			-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan												
SASARAN KEGIATAN:												
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan												
OUTPUT KEGIATAN:												
		1	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan perdesaan			Laporan	-	1	1	1	1	4
		2	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan			Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS												
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu											
SASARAN PROGRAM:												
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh												
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh												
SASARAN KEGIATAN:												
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu												
OUTPUT KEGIATAN:												
		1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu			Hektar						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan								
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman									
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan		-	1	1	1	1	4
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan		1	2	2	2	2	9

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV									
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5
2	Jumlah Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan		1	1	1	1	1	5

4.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian sasaran strategis Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memerlukan dukungan pendanaan pembangunan yang memadai dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis kebutuhan pendanaan, total alokasi anggaran yang dibutuhkan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan sebesar Rp13,34 triliun. Estimasi kebutuhan anggaran tersebut disusun untuk mendukung penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman serta program dukungan manajemen guna mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. 1 Kerangka Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1		-2		-3		-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan											
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:											
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi										
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak											
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV											
OUTPUT KEGIATAN:											
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan		50.000	175.000	184.450	194.410	204.908	808.768	
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen		-	60.000	63.240	66.655	70.254	260.149	
	3	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	752.859,00	793.513,39	836.363,11	881.526,72	3.264.262	
	4	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen		-	60.000	63.240	66.655	70.254	260.149	
	5	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan		-	413.853	436.201	459.756	484.583	1.794.393	
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	175.000	184.450	194.410	204.908	758.768	
	7	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan		-	135.000	142.290	149.974	158.072	585.336	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1		-2	-3		-10	-11	-12	-13	-14	-15
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit			9.805.489.051,00	10.196.145.985,00	10.664.934.307,00	11.289.985.401,00	41.956.554.744
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit							-
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen		-	0	88.900,00	93.701	98.760	281.361
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1.932.901	2.037.278	2.147.291	2.263.244	8.380.714
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen		-	220.029	231.911	244.434	257.633	954.006
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	95.000	100.130	105.537	111.236	411.903

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1		-2	-3		-10	-11	-12	-13	-14	-15
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit		35.734.000,00	193.829.452.500	203.497.905.000	213.166.357.500	222.834.810.000	833.364.259.000
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit			255.550.162.866,00	263.204.011.834	275.709.179.817	288.214.347.800	1.082.677.702.317
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit		32.000.000.000,00	165.662.183.966,00	167.050.400,00	174.627.200.000,00	182.204.000.000,00	554.660.434.366
	4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan		-	88.500,00	93.279	98.316	103.625	383.720
	5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan		-	384.455	405.215,57	427.097,21	450.160,46	1.666.928
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		-	1.738.752,00	1.832.644,61	1.931.607,42	2.035.914,22	7.538.918
	7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	95.000	100.130	105.537	111.236	411.903
	8	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1.914.700	2.018.094	2.127.071	2.241.933	8.301.797

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	INDIKASI LOKASI	ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1			-2	-3		-10	-11	-12	-13	-14	-15
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan											
OUTPUT KEGIATAN:											
		1	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan perdesaan	Laporan		-	177.000	186.558	196.632	207.250	767.440
		2	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	80.000	84.320	88.873	111.236	364.429
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS											
		2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu								
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh											
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu											
OUTPUT KEGIATAN:											
		1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3		-10	-11	-12	-13	-14	-15
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan								
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman									
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan		-	52.600	75.000	100.000	125.000	352.600
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan		129.232	182.150	200.365	220.410	242.451	974.608
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan		174.233	450.000	495.000	544.500	598.950	2.262.683

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3		-10	-11	-12	-13	-14	-15
SASARAN STRATEGIS 2:									
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SASARAN PROGRAM:									
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV									
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan		10.383.978	28.427.273	29.848.637	31.341.069	32.908.122	132.909.079
2	Jumlah Layanan Umum	Layanan		19.169	62.700	65.835	69.127	72.583	289.414
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan		40.183	425.450	446.722	469.059	492.512	1.873.926



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan IV Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kinerja Balai dalam mendukung Rencana Strategis Kementerian serta selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Balai dalam mengemban mandat penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, aman, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat kontribusi Balai terhadap agenda pembangunan perumahan nasional, termasuk percepatan pengurangan backlog dan peningkatan kualitas permukiman.

Sejalan dengan komitmen nasional pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dengan fokus pada kelompok MBR, pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029 menuntut penguatan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi lintas pemangku kepentingan: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, organisasi sosial, serta akademisi/pemerhati bidang perumahan. Dalam konteks ini, Balai berperan sebagai penggerak pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan skema pembiayaan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, agar seluruh sumber daya dapat dimobilisasi secara optimal untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Pada akhirnya, Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan IV Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya MBR, melalui penyediaan hunian layak huni yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai, peningkatan kepastian hukum bermukim, serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta tata kelola yang transparan dan akuntabel, pelaksanaan Renstra ini diharapkan berjalan efektif sehingga pemenuhan hak dasar atas hunian layak semakin terjamin, sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, inklusif, berkeadilan, dan produktif.

Dalam rangka memastikan ketercapaian target dan konsistensi pelaksanaan perencanaan, Renstra ini dilengkapi dengan mekanisme evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pemantauan kinerja program dan kegiatan berdasarkan indikator yang terukur, baik indikator keluaran maupun hasil, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Proses evaluasi dilaksanakan melalui rapat monitoring dan evaluasi secara periodik, penyusunan laporan kinerja, reviu internal oleh unit pengawasan, serta koordinasi dengan unit eselon I terkait.

Selain itu, dilakukan evaluasi tahunan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak pelaksanaan program terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk kontribusinya terhadap penurunan backlog dan peningkatan kualitas permukiman. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan perencanaan tahun berikutnya melalui mekanisme umpan balik, penyesuaian target, penyempurnaan strategi pelaksanaan, serta penguatan pengendalian internal. Dengan mekanisme evaluasi yang sistematis, adaptif, dan berbasis data, pelaksanaan Renstra diharapkan tetap responsif terhadap dinamika lingkungan strategis serta mampu menjaga akuntabilitas dan kualitas kinerja Balai secara berkelanjutan.

Renstra ini bersifat dinamis dan senantiasa terbuka untuk penyempurnaan sesuai perkembangan lingkungan strategis, regulasi, dan kebutuhan daerah. Melalui semangat gotong royong, koordinasi vertikal dan horizontal yang semakin kuat, serta kolaborasi lintas sektor yang konsisten, Balai optimis dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, dan penanganan rumah tidak layak huni secara lebih merata dan berkelanjutan di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan IV sepanjang periode 2025 – 2029.



LAMPIRAN



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1		-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumatera IV																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit		-	669	669	669	669	2.676		9.805.489.051,00	10.196.145.985,00	10.664.934.307,00	11.289.985.401,00	41.956.554.744
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit		-	-	-	-	-	-						-
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen		-	-	1	1	1	3	-	0	88.900,00	93.701	98.760	281.361
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	1.932.901	2.037.278	2.147.291	2.263.244	8.380.714
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	220.029	231.911	244.434	257.633	954.006
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	95.000	100.130	105.537	111.236	411.903
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit		1.098	8.007	8.007	8.007	8.007	33.126	35.734.000,00	193.829.452.500	203.497.905.000	213.166.357.500	222.834.810.000	833.364.259.000
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit			593	593	593	593	2.372		255.550.162.866,00	263.204.011.834	275.709.179.817	288.214.347.800	1.082.677.702.317
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit		32	88	88	88	88	384	32.000.000.000,00	165.662.183.966,00	167.050.400,00	174.627.200.000,00	182.204.000.000,00	554.660.434.366
	4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	88.500,00	93.279	98.316	103.625	383.720
	5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	384.455	405.215,57	427.097,21	450.160,46	1.666.928
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	1.738.752,00	1.832.644,61	1.931.607,42	2.035.914,22	7.538.918
	7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	95.000	100.130	105.537	111.236	411.903
	8	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	1.914.700	2.018.094	2.127.071	2.241.933	8.301.797

Lampiran. 1 Matriks Kinerja Balai P3KP Sumatera IV

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2025	2026			2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
-1		-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumatera IV																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit		-	669	669	669	669	2.676		9.805.489.051,00	10.196.145.985,00	10.664.934.307,00	11.289.985.401,00	41.956.554.744
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit		-	-	-	-	-	-						-
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen		-	-	1	1	1	3	-	0	88.900,00	93.701	98.760	281.361
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	1.932.901	2.037.278	2.147.291	2.263.244	8.380.714
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	220.029	231.911	244.434	257.633	954.006
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	95.000	100.130	105.537	111.236	411.903
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit		1.098	8.007	8.007	8.007	8.007	33.126	35.734.000,00	193.829.452.500	203.497.905.000	213.166.357.500	222.834.810.000	833.364.259.000
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit			593	593	593	593	2.372		255.550.162.866,00	263.204.011.834	275.709.179.817	288.214.347.800	1.082.677.702.317
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit		32	88	88	88	88	384	32.000.000.000,00	165.662.183.966,00	167.050.400,00	174.627.200.000,00	182.204.000.000,00	554.660.434.366
	4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	88.500,00	93.279	98.316	103.625	383.720
	5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	384.455	405.215,57	427.097,21	450.160,46	1.666.928
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	1.738.752,00	1.832.644,61	1.931.607,42	2.035.914,22	7.538.918
	7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	95.000	100.130	105.537	111.236	411.903
	8	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	1.914.700	2.018.094	2.127.071	2.241.933	8.301.797

Lampiran. 2 Matriks Kinerja Balai P3KP Sumatera IV

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
	-1	-2			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
					-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	52.600	75.000	100.000	125.000	352.600
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5	129.232	182.150	200.365	220.410	242.451	974.608
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan		1	2	2	2	2	9	174.233	450.000	495.000	544.500	598.950	2.262.683
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
1		Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV																
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	10.383.978	28.427.273	29.848.637	31.341.069	32.908.122	132.909.079
	2	Jumlah Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	19.169	62.700	65.835	69.127	72.583	289.414
	3	Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	40.183	425.450	446.722	469.059	492.512	1.873.926

Lampiran. 3 Matriks Kinerja Balai P3KP Sumatera IV